

RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH



2024

KABUPATEN KAPUAS HULU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pedapatan Daerah Kapuas Hulu Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam RKPD ini, baik dari aspek metode penulisan, substansi isi serta aspek lainnya. Akan tetapi, kami berharap, penyelesaian RKPD Badan Pedapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 merupakan langkah awal dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Renja BPPD Kapuas Hulu dibuat dengan tujuan memberikan gambaran kepada semua pihak terhadap:

- a. Kerangka pikir lahir dan fungsi dari Badan Pedapatan Daerah;
- b. Argumentasi yuridis dan teoritis Badan Pedapatan Daerah;
- c. Gambaran Umum Sumber Daya Badan Pedapatan Daerah Kab. Kapuas Hulu
- d. Kedudukan, Tugas, fungsi serta kewenangan yang dimiliki;
- e. Program dan Kegiatan Badan Pedapatan Daerah Tahun 2024;

Dengan Rencana Kerja Badan Pedapatan Daerah Kapuas Hulu Tahun 2024 telah ditetapkan diharapkan muncul alat umpan balik (*Feedback*) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Semoga Rencana Kerja Di Badan Pedapatan Daerah Kapuas Hulu Tahun 2024 dapat digunakan bagi pihak – pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Putussibau, 06 Februari 2024

Kepala Badan Pedapatan Daerah,

AGUSTINUS STORMANDI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670805 199403 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan BPPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2 Capaian Kinerja Pelayanan SKPD	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan SKPD	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	30
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah.....	30
3.3 Program dan Kegiatan	31
BAB IV PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengamanatkan tentang penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah sebagai perencanaan tahunan dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah. Dokumen Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berisi program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalamnya juga memuat kebijakan, permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan program-program serta kegiatan sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), diharapkan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai 5 pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program OPD lainnya.

1.2 DASAR HUKUM.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana dipaparkan di atas merupakan amanah Undang-Undang dan wajib dibuat oleh setiap jenjang pemerintahan. Dasar Hukum terhadap Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 99);
17. Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 050/389/Bappeda/P3 Tanggal 2 Februari 2023 perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2024;

18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 110 Tahun 2021).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dimaksudkan sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertujuan untuk :

1. Mengetahui Alasan terhadap disusunnya RKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Memahami Kondisi wilayah dan Sumber Daya yang dimiliki
3. Memahami Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah.
4. Melakukan review terhadap RKPD Tahun 2023
5. Memahami Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan;

1.4 SISTEMATIKA

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

- Bab I : Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Lalu
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Badan Pendapatan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan SKPD
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah
- 3.3. Program Dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Badan Pengelola Badan Perbatasan Daerah tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi:

- a. Kemampuan SKPD dalam merealisasikan target kinerja.
- b. Sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya.
- c. Faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I s/d IV TAHUN 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sa sar an	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renja PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja PD 2023 Yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Akhir Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)	Tingkat Capaian Knerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Unit PD Pena nggu ng Jawa b				
													I		II		III		IV										
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100		16
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN																						
			5	2			PENGELOLA AN PENDAPATA N																						
			5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA																						
1			5	2	1	2,01	Perencanaan , Penggagara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	36.32 4.200	0,0 0%	28.88 7.200	100 %	36.32 4.200	0,0 0%	-	0,0 0%	-	0,0 0%	-	97,91 %	35.56 5.700	97,91 %	35.56 5.700	97,91 %	64.45 2.900	97,91 %	177,44 %	BAP END A
			5	2	1	2,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	6.587. 600	100 ,00 %	3.467. 600	100 %	6.587. 600	0,0 0%	-	0,0 0%	-	0,0 0%	-	97,30 %	6.410. 000	97,30 %	6.410. 000	197,30 %	9.877. 600	197,30 %	149,94 %	BAP END A
			5	2	1	2,01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	4.650. 600	100 ,00 %	3.092. 600	100 %	4.650. 600	0,0 0%	-	0,0 0%	-	0,0 0%	-	97,89 %	4.552. 700	97,89 %	4.552. 700	197,89 %	7.645. 300	197,89 %	164,39 %	BAP END A

		5	2	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	2.867.600	100%	2.867.600	100%	2.867.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,88%	2.835.450	98,88%	2.835.450	198,88%	5.703.050	198,88%	198,88%	BAP END A
		5	2	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	4.247.600	100%	3.092.600	100%	4.247.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,74%	4.193.950	98,74%	4.193.950	198,74%	7.286.550	198,74%	171,55%	BAP END A
		5	2	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	4.522.600	100%	2.942.600	100%	4.522.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	97,74%	4.420.200	97,74%	4.420.200	197,74%	7.362.800	197,74%	162,80%	BAP END A
		5	2	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	5.432.600	100%	5.420.600	100%	5.432.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	97,49%	5.296.200	97,49%	5.296.200	197,49%	10.716.800	197,49%	197,27%	BAP END A
		5	2	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	8.015.600	100%	8.003.600	100%	8.015.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,02%	7.857.200	98,02%	7.857.200	198,02%	15.860.800	198,02%	197,87%	BAP END A
2		5	2	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.878.547.717		2.878.547.717	100%	2.878.547.717	18,53%	449.376.045	40,86%	1.176.286.304	58,31%	1.678.484.815	88,07%	2.535.257.751	88,07%	2.535.257.751	88,07%	5.413.805.468	88,07%	188,07%	BAP END A
		5	2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	2.677.142.717	93,42%	2.677.142.717	100%	2.677.142.717	18,10%	402.546.045	48,44%	1.079.906.304	70,65%	1.580.744.815	87,18%	2.333.936.751	87,18%	2.333.936.751	180,60%	5.011.079.468	180,60%	187,18%	BAP END A
		5	2	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	195.480.000	97,19%	195.480.000	100%	195.480.000	24,02%	46.830.000	49,43%	96.380.000	50,00%	97.740.000	100,00%	195.480.000	100,00%	195.480.000	197,19%	390.960.000	197,19%	200,00%	BAP END A
		5	2	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	5.925.000	100%	5.925.000	100%	5.925.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,58%	5.841.000	98,58%	5.841.000	198,58%	11.766.000	198,58%	198,58%	BAP END A

			5	2	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100%	10.191.000	0,00%	-	100%	10.191.000	0,00%	-	0,00%	-	10,30%	1.050.000	98,40%	10.028.000	98,40%	10.028.000	98,40%	10.028.000	98,40%	266,07%	BAP	END	A		
3			5	2	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	4.200.000		6.975.000	100%	4.200.000	25,00%	1.050.000	50,00%	2.100.000	75,00%	3.150.000	100,00%	4.200.000	100,00%	4.200.000	100,00%	4.200.000	100,00%	11.175.000	100,00%	266,07%	BAP	END	A
			5	2	1	2,05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100%	4.200.000	99,64%	6.975.000	100%	4.200.000	25,00%	1.050.000	50,00%	2.100.000	75,00%	3.150.000	100,00%	4.200.000	100,00%	4.200.000	199,64%	11.175.000	199,64%	266,07%	BAP	END	A		
4			5	2	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	808.530.000		538.894.557	100%	808.530.000	10,20%	82.489.800	29,38%	237.531.579	30,44%	246.097.345	92,72%	749.671.032	93%	749.671.032	92,72%	1.288.565.589	92,72%	159,37%	BAP	END	A		
			5	2	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	8.817.000	100,00%	4.540.000	100%	8.817.000	0,00%	-	100,00%	8.817.000	100,00%	-	100,00%	8.817.000	100,00%	8.817.000	200,00%	13.357.000	200,00%	151,49%	BAP	END	A		
			5	2	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100.691.000	100,00%	74.116.400	100%	100.691.000	0,00%	-	17,38%	16.685.000	78,46%	51.732.700	98,77%	99.449.500	98,77%	99.449.500	198,77%	173.565.900	198,77%	172,37%	BAP	END	A		
			5	2	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	28.500.000	100,00%	14.362.400	100%	28.500.000	0,00%	-	41,95%	11.955.000	61,32%	8.986.000	99,51%	28.360.000	99,51%	28.360.000	199,51%	42.722.400	199,51%	149,90%	BAP	END	A		
			5	2	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	670.545.000	99,62%	445.875.757	100%	670.545.000	16,46%	82.489.800	33,35%	200.074.579	53,36%	185.378.645	91,42%	613.044.532	91,42%	613.044.532	191,04%	1.058.920.289	191,04%	157,92%	BAP	END	A		
5			5	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	19.100.000		-	100%	19.100.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	99,90%	19.080.000	99,90%	19.080.000	99,90%	19.080.000	99,90%	99,90%	BAP	END	A		
			5	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	19.100.000	0,00%	-	100%	19.100.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	99,90%	19.080.000	99,90%	19.080.000	99,90%	19.080.000	99,90%	99,90%	BAP	END	A		

5		5	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	920.658.300		830.699.495	100%	920.658.300	22,49%	207.025.900	46,90%	431.770.549	71,15%	655.057.799	99,52%	916.221.142	99,52%	916.221.142	99,52%	1.746.920.637	99,52%	189,75%	BAP END A
		5	2	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	4.750.000	100,00%	4.750.000	100%	4.750.000	0,00%	-	49,94%	2.372.000	74,91%	3.558.000	100,00%	4.750.000	100,00%	4.750.000	200,00%	9.500.000	200,00%	200,00%	BAP END A
		5	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	120.422.400	97,62%	92.901.495	100%	120.422.400	25,44%	30.348.700	47,98%	57.779.989	72,16%	86.895.799	96,70%	116.444.642	96,70%	116.444.642	194,31%	209.346.137	194,31%	173,84%	BAP END A
		5	2	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	795.485.900	99,70%	733.048.000	100%	795.485.900	23,71%	176.677.200	47,11%	371.618.560	71,58%	564.604.000	99,94%	795.026.500	99,94%	795.026.500	199,64%	1.528.074.500	199,64%	192,09%	BAP END A
6		5	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	257.402.100		166.488.300	100%	257.402.100	13,78%	35.465.000	28,83%	74.199.500	50,69%	130.479.500	86,12%	221.667.600	86,12%	221.667.600	86,12%	388.155.900	86,12%	150,80%	BAP END A
		5	2	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	257.402.100	90,60%	166.488.300	100%	257.402.100	21,48%	35.465.000	33,71%	74.199.500	59,28%	130.479.500	86,12%	221.667.600	86,12%	221.667.600	176,72%	388.155.900	176,72%	150,80%	BAP END A
			2	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	17.050.000	0,00%	-	100%	17.050.000	0,00%	-	35,78%	6.100.000	100,00%	17.050.000	100,00%	17.050.000	100,00%	17.050.000	100,00%	17.050.000	100,00%	100,00%	BAP END A
		5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH																						
1		5	2	4	2,01		PENGELOLAAN PENDAPATAN		100%	1.684.895.887		1.128.482.832	100%	1.806.278.574	5,78%	104.490.000	19,19%	323.310.200	39,89%	672.029.030	93,37%	1.573.253.717	87,10%	1.573.253.717	87,10%	2.701.736.549	87,10%	160,35%	BAP END A
		5	2	4	2,01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersusunnya Strategi Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	236.381.000	0,00%	-	100%	236.381.000	0,00%	-	0,00%	-	8,79%	18.059.300	77,87%	184.074.700	77,87%	184.074.700	77,87%	184.074.700	77,87%	77,87%	BAP END A

			2	4	2,01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	129.682.687	0,00%	-	100%	129.682.687	0,00%	-	9,25%	12.000.000	88,62%	114.930.730	98,43%	127.650.730	98,43%	127.650.730	98,43%	127.650.730	98,43%	98,43%	BAP END A
		5	6	4	2,01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak Yang Terdata	100%	286.400.000	99,88%	117.895.000	100%	129.682.687	49,24%	63.145.000	62,22%	117.790.000	87,92%	166.425.000	99,91%	286.145.000	220,65%	286.145.000	320,53%	404.040.000	320,53%	141,08%	BAP END A
		5	6	4	2,01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	100%	8.300.000	96,99%	307.115.000	100%	286.400.000	0,00%	-	9,97%	7.720.000	9,97%	7.720.000	93,01%	7.720.000	2,70%	7.720.000	99,69%	314.835.000	99,69%	3793,19%	BAP END A
		5	6	4	2,01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah WP Yang Dilayani	100%	348.932.200	77,00%	372.537.832	100%	348.932.200	0,63%	2.400.000	10,19%	40.255.200	24,38%	96.279.000	84,94%	296.378.287	84,94%	296.378.287	161,93%	668.916.119	161,93%	191,70%	BAP END A
3		5	6	4	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Yang di Tagih	100%	275.800.000	99,96%	282.780.000	100%	275.800.000	16,93%	38.945.000	45,38%	113.410.000	67,56%	168.835.000	99,96%	275.700.000	99,96%	275.700.000	199,93%	558.480.000	199,93%	202,49%	BAP END A
		5	6	4	2,01	13	Pengendalian , Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi Pendukung Pelayanan Pajak Daerah	100%	399.400.000	99,49%	48.155.000	100%	399.400.000	0,00%	-	8,86%	32.135.000	27,52%	99.780.000	99,04%	395.585.000	99,04%	395.585.000	198,54%	443.740.000	198,54%	111,10%	BAP END A

2.2 CAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya serta berpedoman pada uraian tugas pokok, fungsi organisasi pelayanan SKPD Kabupaten Kapuas Hulu. Keberhasilan kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan SKPD Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Predikat Sakip			A	C	C	C	C	CC	N	B	B	
2.	Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan			4.45%	4.45%	4.45%	4.45%	4.45%	N	N	4.45%	4.45%	
3.	Pesentase Peningkatan Realisasi PAD			10%	10%	10%	10%	10%	N	N	10%	10%	
4.	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal			82	82	82	82	82	N	N	82	82	

2.3 ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengelola urusan pendapatan daerah, oleh karena itu, hal ini mendapat penekanan khusus dalam Renja Badan Pendapatan Daerah setiap

tahun anggaran mengingat bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Bahkan beberapa kalangan berpendapat bahwa PAD merupakan barometer utama derajat kemandirian fiskal suatu daerah otonom. Guna merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengembangkan PAD prediksi kekuatan, peluang, hambatan dan tantangan pengembangannya tahun 2022 secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. *Kekuatan*

- a. PAD memiliki landasan hukum pemungutan yang cukup kuat
- b. Otoritas Pemda untuk mensinergikan berbagai sumber daya untuk menggali dan mengembangkan potensi PAD.
- c. Badan Pendapatan Daerah selaku *coordinator collector unit* didukung unit-unit penghasil maupun unit-unit pengelola mempunyai mandat yang kuat dari pemerintah daerah.
- d. Pengelolaan Pendapatan Daerah telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Didalam Pengelolaan Pendapatan Daerah sedang dan akan memanfaatkan teknologi informasi.
- f. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selaku Koordinator pengelolaan pendapatan daerah mendapat dukungan dari instansi-instansi lainnya.

2. *Peluang*

- a. PAD senantiasa diharapkan dan didorong untuk selalu ditingkatkan.
- b. Realisasi penerimaan sumber-sumber PAD yang sudah memiliki dasar hukum pemungutan masih berpeluang untuk ditingkatkan.
- c. Potensi sumber-sumber PAD yang belum memiliki dasar hukum pemungutan masih relatif banyak.
- d. Setiap pelayanan terutama disektor ekonomi khususnya yang bersifat komersil pada dasarnya berpeluang menjadi sumber PAD. PAD berpotensi berkembang equivalen dengan perkembangan aktivitas perekonomian daerah maupun perekonomian masyarakat.

3. *Hambatan*

- a. Potensi sumber-sumber PAD yang sudah memiliki dasar hukum pemungutan sangat terbatas, bahkan beberapa diantaranya apabila dianalisis dengan pendekatan B/C ratio berada dalam kondisi tidak layak.
- b. Upaya-upaya peningkatan PAD sangat-sangat dipengaruhi kualitas pengelolaan.
- c. Upaya-upaya pemungutan belum dilakukan secara sinergis bahkan beberapa diantaranya masih terkesan berjalan sendiri-sendiri.

- d. Tingkat penghindaran pungutan relatif tinggi (*budaya kalau bisa gratis mengapa harus bayar*).
- e. Tingkat pungutan-pungutan tidak resmi relatif tinggi, kemampuan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap klien (Wajib Pajak/Retribusi) sangat terbatas.
- f. Transparansi dan akuntabilitas penetapan tarif masih sulit dilakukan.
- g. Penetapan target belum seluruhnya didasarkan atas analisis potensi, yield, efektifitas dan efisiensi.
- h. Kemampuan menjangkau obyek pungutan masih sangat terbatas.
- i. Kemampuan mensosialisasikan pungutan daerah masih sangat terbatas dan belum sinergis.
- j. Sistem reward and punishment pengelolaan belum memberikan stimulan yang mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pungutan.
- k. Diperlukan waktu yang panjang untuk mensosialisasikan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.
- l. Terbatasnya sumber daya aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- m. Kemampuan memungut pajak sudah dilaksanakan tetapi masih ada yang berani menjadi pungli dimasyarakat.

4. Tantangan

- a. PAD pada dasarnya menjadi barometer kemandirian daerah dalam hal pembiayaan.
- b. Upaya-upaya peningkatan PAD senantiasa dikritisi menjadi salah satu faktor penyebab high cost economic.
- c. Upaya-upaya peningkatan PAD apabila dilakukan melalui pembuatan perda pungutan baru atau peningkatan tarif akan senantiasa dikritisi banyak pihak (dianggap sebagai suatu kebijakan yang sangat tidak populis).
- d. Entrepreneur spirit jajaran yang terkait relatif masih memerlukan sentuhan-sentuhan stimulan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai.
- e. Sistem pembiayaan daerah masih sangat didominasi cost centre, dalam perspektif peningkatan dan pengembangan PAD seyogyanya pembiayaan yang bersifat revenue centre dan profit centre perlu mendapat porsi yang lebih signifikan.
- f. Terjadinya perubahan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.
- g. Menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kondisi di daerah.
- h. Semakin tingginya tingkat pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KAPUAS HULU
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGE T 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						6.325.943.465,00							5.465.064.051,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.325.943.465,00							5.465.064.051,00	
	5.02	KEUANGAN						6.325.943.465,00							5.465.064.051,00	
1,	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.958.197.351,00						-	4.721.576.505,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Peningkatan Ekonomi Sektor Unggulan	-	-	36.324.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-		6.587.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-		4.650.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-		² .867.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5.02.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-		.247.600,00 ⁴	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Peningkatan EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-		.522.600,00 ⁴	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Peningkatan EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-		.432.600,00 ⁵	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningka tk an Kualitas dan Kuantitas In frastrukt ur Pelayana n Dasar dan Ekonomi PENING KA TAN EKONO MI SEKTOR U NGGULA N	-		8.015.600,00	BADAN PENDAPATA N DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.088.618.967, 00			-	Meningka tk an Kualitas dan Kuantitas In frastrukt ur Pelayana n Dasar dan Ekonomi PENING KA TAN EKONO MI SEKTOR U NGGULA N	-	-	2.436.238.505, 00	BADAN PENDAPATA N DAERAH
	5.02.01.2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bul an	2.896.738.967, 00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningka tk an Kualitas dan Kuantitas In frastrukt ur Pelayana n Dasar dan Ekonomi PENING KA TAN EKONO MI SEKTOR U NGGULA N	-		2.224.522.505, 00	BADAN PENDAPATA N DAERAH
	5.02.01.2.02.0 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	191.880.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-		195.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-		5.925.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-		10.191.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	4.200.000,00			-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-	-	4.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	4.200.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-		4.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	697.096.000,00			-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-	-	634.498.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.736.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningka tk an Kualitas dan Kuantitas In frastrukt ur Pelayana n Dasar dan Ekonomi PENING KA TAN EKONO MI SEKTOR U NGGULA N	-		8.817.000,00	BADAN PENDAPATA N DAERAH
	5.02.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	92.364.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningka tk an Kualitas dan Kuantitas In frastrukt ur Pelayana n Dasar dan Ekonomi PENING KA TAN EKONO MI SEKTOR U NGGULA N	-		95.995.000,00	BADAN PENDAPATA N DAERAH
	5.02.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	39.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningka tk an Kualitas dan Kuantitas In frastrukt ur Pelayana n Dasar dan Ekonomi PENING KA TAN EKONO MI SEKTOR U NGGULA N	-		28.500.000,00	BADAN PENDAPATA N DAERAH

	5.02.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	556.996.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-		501.186.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	558.880.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			-				-	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		550.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-		8.880.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	975.647.384,00			-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Peningkatan Ekonomi Sektor Unggulan	-	-	869.301.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.125.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Peningkatan Ekonomi Sektor Unggulan	-		4.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	120.422.400,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Peningkatan Ekonomi Sektor Unggulan	-		119.282.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5.02.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	850.099.984,0 0	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningka tk an Kualitas dan Kuantitas In frastrukt r Pelayana n Dasar dan Ekonomi PENING KA TAN EKONO MI SEKTOR U NGGULA N	-		745.268.800,0 0	BADAN PENDAPATA N DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	192.635.000,0 0			-	Meningka tk an Kualitas dan Kuantitas In frastrukt r Pelayana n Dasar dan Ekonomi PENING KA TAN EKONO MI SEKTOR U NGGULA N	-	-	182.134.600,0 0	BADAN PENDAPATA N DAERAH
	5.02.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	175.585.000,0 0	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningka tk an Kualitas dan Kuantitas In frastrukt r Pelayana n Dasar dan Ekonomi PENING KA TAN EKONO MI SEKTOR U NGGULA N	-		165.084.600,0 0	BADAN PENDAPATA N DAERAH

	5.02.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	17.050.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-		17.050.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2,	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	1.367.746.114,00						-	743.487.546,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	1.367.746.114,00			-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-	-	743.487.546,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

			0				0 0	23.225.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	90.452.520,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-		134.114.687,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	157.550.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi PENINGKATAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN	-		128.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	5.02.04.2.01.009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10 Layanan	578.168.594,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Peningkatan Sektor Unggulan	-		125.561.429,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	164.750.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi Peningkatan Sektor Unggulan	-		230.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	353.600.000,0 0	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningka tk an Kualitas dan Kuantitas In frastrukt r Pelayana n Dasar dan Ekonomi PENING KA TAN EKONO MI SEKTOR U NGGULA N	-		125.561.430,0 0	BADAN PENDAPATA N DAERAH
	J U M L A H							6.325.943.465, 00							5.465.064.051, 00	

BAB III

TUJUAN, SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sejalan dengan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2021 – 2026, maka arah kebijakan khusus pembangunan di Badan Pendapatan Daerah khususnya sektor pendapatan diletakan pada :

1. Pengembangan, penggalian dan peningkatan sumber – sumber pendapatan daerah yang potensial;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak/ retribusi;
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan dalam pengelolaan PAD;
4. Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan pemerintah daerah khususnya berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pembiayaan pembangunan daerah dalam pembiayaan pembangunan yang ditempuh melalui perkuatan ekonomi daerah dan optimalisasi penerimaan PAD;
6. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pembiayaan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas;
7. Peningkatan administrasi pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, sistematis dan terkendali serta dapat dipertanggung jawabkan;
8. Penyediaan kemudahan informasi pendapatan daerah secara cepat, akurat, tepat, dan mudah diakses;
9. UOP Dating data berkelanjutan;
10. Peningkatan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah;
11. Peningkatan kemampuan aparatur pengelola pendapatan daerah;
12. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah;
13. Pemutahiran data dan sistem pengelolaan pendapatan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPENDA

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang harus dicapai dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah periode tahun 2021 – 2026 adalah :

- a. *Terwujudnya peningkatan profesionalisme pungutan PAD;*
- b. *Terwujudnya peningkatan realisasi penerimaan daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak sesuai dengan potensi wilayah;*
- c. *Terwujudnya peningkatan realisasi penerimaan dari lain-lain sumber pendapatan daerah yang sah sesuai potensi sumber yang ada;*
- d. *Terwujudnya pemberian dukungan yang optimal kepada unit-unit penghasil/pengelola sesuai kebutuhan serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.*

Sasaran yang harus dicapai dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah periode 2021-2026 adalah :

- a. *Penerapan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien;*

- b. *Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur pengelolaan pendapatan daerah;*
- c. *Peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah.*

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Kedudukan

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

Adapun yang menjadi tugas dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Sub Urusan Pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.

c. Fungsi

Selain melaksanakan tugas Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. pelaksanaan dukungan teknis di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Program Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dibagi kedalam program yang mendukung pelaksanaan program utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (urusan wajib/belanja langsung) sedangkan program lain merupakan kegiatan belanja rutin dengan rincian sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 7 (Tujuh) Kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub kegiatan, yaitu:**
 - **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**
 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 4. Fasilitas Kunjungan Tamu.
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 2. Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik.
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui 1 (Kegiatan) dan 6 (Enam) sub kegiatan yaitu :**
 - **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.**
 1. Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
 2. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
 3. Penetapan Wajib Pajak Daerah.
 4. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.
 5. Penagihan Pajak Daerah.
 6. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

Untuk melancarkan pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu maka diperlukan sebuah rencana kerja dan prakiraan rencana kerja untuk tahun berikutnya. Berikut Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPENDA Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2025**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Progra m	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiata n				Tolo k Uku r	Targe t		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	0 2				KEUANGAN								6,737,896,1 60				7,389,185,7 76		
5	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,502,896,1 60				4,930,685,7 76		
5	0 2	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								59,500,000				65,450,000		
5	0 2	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan			7 Dokume n	8,500,000	Dana Transf er Umum - Dana Alokas i Umum				9,350,000	
5	0 2	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan			1 Dokume n	8,500,000	Dana Transf er Umum - Dana Alokas i Umum				9,350,000	
5	0 2	0 1	2.0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan			1 Dokume n	8,500,000	Dana Transf er Umum - Dana Alokas i Umum				9,350,000	

5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	8,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				9,350,000
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	8,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				9,350,000
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	8,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				9,350,000
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			9 Dokumen	8,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				9,350,000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,726,566,460					2,999,223,106
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan ASN		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			14 Dokumen	2,561,026,460	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2,817,129,106
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	142,040,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				156,244,000

5	0 2	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan			1 Dokume n	8,500,000	Dana Transf er Umum - Dana Alokas i Umum				9,350,000
5	0 2	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem es teran SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem este SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan			1 Dokume n	15,000,000	Dana Transf er Umum - Dana Alokas i Umum				16,500,000
5	0 2	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								33,450,000					36,795,000
5	0 2	0 1	2.0 5	0 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan			1 Dokume n	4,200,000	Dana Transf er Umum - Dana Alokas i Umum				4,620,000
5	0 2	0 1	2.0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan			1 Dokume n	29,250,000	Dana Transf er Umum - Dana Alokas i Umum				32,175,000
5	0 2	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah								474,287,200					521,715,920
5	0 2	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan			1 Dokume n	7,500,000	Dana Transf er Umum - Dana Alokas i Umum				8,250,000

5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	76,787,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				84,465,920
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				27,500,000
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				16,500,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	350,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				385,000,000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								225,000,000					225,000,000
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				75,000,000
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				150,000,000

5	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							887,092,500					975,801,750
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	120,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				132,000,000
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	84,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				93,060,000
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	682,492,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				750,741,750
5	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							97,000,000					106,700,000
5	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	72,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				79,200,000
5	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				27,500,000
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							2,235,000,000					2,458,500,000
5	0	0	2.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							2,235,000,000					2,458,500,000

5	0 2	0 4	2.0 1	0 1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	120,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				132,000,000
5	0 2	0 4	2.0 1	0 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	120,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				132,000,000
5	0 2	0 4	2.0 1	0 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	120,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				132,000,000
5	0 2	0 4	2.0 1	0 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 Unit	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				165,000,000
5	0 2	0 4	2.0 1	0 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 Laporan	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				220,000,000

5	0 2	0 4	2.0 1	0 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				110,000,000
5	0 2	0 4	2.0 1	0 7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			60.000 Obyek Pajak	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				110,000,000
5	0 2	0 4	2.0 1	0 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				165,000,000
5	0 2	0 4	2.0 1	0 9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 Layanan	450,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				495,000,000
5	0 2	0 4	2.0 1	1 0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Jumlah Dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				82,500,000
5	0 2	0 4	2.0 1	1 1	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10 Dokumen	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				275,000,000

5	0 2	0 4	2.0 1	1 2	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				110,000,000
5	0 2	0 4	2.0 1	1 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksannnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				110,000,000
5	0 2	0 4	2.0 1	1 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				110,000,000
5	0 2	0 4	2.0 1	1 5	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				110,000,000
TOTAL													6,737,896,160					7,389,185,776

BAB IV

P E N U T U P

Sebagai Perangkat Daerah (PD) maka Badan Pendapatan Daerah merupakan satu unit kerja yang memerlukan perhatian khusus di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena unit kerja ini harus dapat mengelola pendapatan, secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang disusun setiap tahun anggaran sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) diharapkan dapat menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Di sadari bahwa keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan program/kegiatan memerlukan dukungan dari semua Perangkat Daerah, sehingga diperlukan langkah-langkah kongkrit dan terintegrasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, 06 Februari 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah,

AGUSTINUS STORMANDI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670805 199403 1 015